

**Fungsi Pengawasan Lurah Kelurahan Kebonjati
Kecamatan Cikole dalam Pencapaian Target
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota
Sukabumi**

Winda Sulastri

windasulastripeko@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study to determine and describe how the monitoring headman in achieving the target of tax payments on land and buildings in the village office Kebonjati Cikole districts of Sukabumi. This type of research is qualitative descriptive research is research that aims to describe the situation in the field with the data obtained from the research.

Source data used are primary data and secondary data relating to the circumstances. Data collection techniques such as library research, field research such as observation, interviews, documentation and analysis of the data over the Internet while authors use data on an interactive model developed by milles and Huberman.

From the research results can be in the know that the supervision headman in the achievement of the payment of taxes on land and buildings in the village office Kebonjati districts Cikole Sukabumi is pretty good, but still there are obstacles or barriers in its implementation, is still need for improvement and enhancement of supervision conducted by the headman of the staff employees to the target property tax payments from the future to be better and increased.

Keywords: Lurah Control, property tax, Village Kebonjati

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fungsi pengawasan Lurah sebagai kepala pemerintahan di tingkat kelurahan, merupakan implementasi dari fungsi kepemimpinan suatu organisasi atau perusahaan. Pada hakekatnya fungsi pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan. Diharapkan dengan diberlakukannya pengawasan melekat dari pimpinan instansi dalam hal ini Lurah, dapat mengoptimalkan kinerja pegawai dalam memenuhi pencapaian target Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di lingkungan kerjanya.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaanketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain Salah satu penerimaan negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang

bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola baik dari segi pemungutan maupun dari segi administrasi pengelolaan. Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Indikasi awal tampak bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) yang merupakan bagian dari tugas pokok Kelurahan di lingkungan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, berjalan mendekati sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik partisipasi masyarakat wajib pajak, juga peran aktif dari petugas di Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole tersebut, yang mendapat pengawasan yang intens dari pemangku jabatan tertinggi yaitu Lurah di Kelurahan tersebut.

Sejauhmana pengawasan Lurah terhadap pencapaian target pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, selanjutnya yang akan penulis amati. Variabel penelitian ini adalah pengawasan dan pencapaian target. Kelurahan Kebonjati dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) mencatat bahwa dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan(PBB) di Kelurahan Kebonjati pada tahun 2011 mengalami kenaikan sekitar 113,62% dibandingkan akhir tahun 2010. Berdasarkan data yang ada, Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Cikole pada dua tahun terakhir dalam realisasinya telah mencapai target. Pada tahun 2010 persentase perolehan PBB di Kecamatan Cikole mencapai 102,97 %, sedangkan pada tahun 2011 mencapai 122,32 %. Akan tetapi jika dilihat dari sisi pengelolaannya, Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Cikole ini belum sepenuhnya optimal karena dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan yang cukup signifikan baik dalam pemungutannya maupun dalam administrasi pengelolaannya. Terhambatnya penerimaan PBB sedikit banyak akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan penerimaan PBB harus terus

dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut PBB. Berdasarkan hal tersebut serta pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka penulis tertarik untuk mengambil judul “ Fungsi Pengawasan Lurah Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole dalam Pencapaian Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Sukabumi”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah fungsi pengawasan Lurah Kelurahan Kebonjati dalam pencapaian target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu: “Untuk mengetahui fungsi pengawasan Lurah Kelurahan Kebonjati dalam pencapaian target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan “.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Menurut pendapat George R. Tery (2006:395) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendapat lain dari Robbin (dalam Sugandha, 1999 : 150) menyatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Sedangkan Kertonegoro (1998 : 163) menyatakan pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya.

Pendapat yang sama dari Terry (dalam Sujamto, 1986 : 17) menyatakan Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Begitu pula Dale (dalam Winardi, 2000:224) berpendapat bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin didalam mencapai tujuan.

2.2. Fungsi Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefulah (2005: 12), fungsi pengawasan adalah :

- a) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang di tetapkan.

- b) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- c) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Maringan (2004: 62), fungsi pengawasan adalah :

- a) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan

2.3. Sistem dan Objek Pengawasan

1) Sistem Pengawasan

(a) Sistem Komperatif, yaitu :

- Mempelajari laporan kemajuan pekerjaan
- Membandingkan laporan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana
- Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan, termasuk pengaruh faktor lingkungan.
- Memberikan penilaian terhadap hasil pekerjaan termasuk para penanggung jawabnya.
- Membuat suatu keputusan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pekerjaan.

(b)Sistem Verifikatif, yaitu :

- Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- Membuat laporan secara periodic terhadap hasil pemeriksaan.
- Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaan.
- Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaan.
- Mengambil keputusan untuk tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

(c) Sistem Inspeksi

Inspeksi dimaksudkan untuk mengecek kebenaran dari hasil laporan. Selain itu inspeksi bertujuan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kebijaksanaan pimpinan, dilakukan dengan rasa kesetiakawanan, solidaritas dan morak yang tinggi.

(d) Sistem Investigasi

Sistem ini lebih menitik beratkan pada penyelidikan/penelitian yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang bersifat negatif. Hal ini karena dari hasil laporan masih bersifat hipotesa (anggapan), laporan tersebut mungkin benar dan mungkin salah, oleh karena itu perlu diteliti lebih dalam untuk dapat mengungkap hipotesis tersebut. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, menganalisa/mengolah data dan penelitian terhadap data tersebut (validitas data). Kemudian dari hasil penelitian tersebut segera diambil keputusan.

2) Objek Pengawasan

Yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni :

- a. Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan atau program tersebut.
- b. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dan harga program.
- c. Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- d. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.

2.4. Standar Operasi Prosedur Pengawasan

1) Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu :

- a. standar fisik
- b. standar moneter
- c. standar waktu

2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

- 3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.
- 4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan
Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.
- 5) Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi
Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

2.5. Pengawasan yang Efektif

Kriteria pengawasan yang efektif :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan (aktivitas)
- b. Pengawasan perlu melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan
- d. Pengawasan harus objektif, teliti sesuai dengan standard yang digunakan
- e. Pengawasan harus luwes / fleksibel
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
- g. Pengawasan harus ekonomis
- h. Pengawasan harus mudah mengerti
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan/koreksi

III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di kantor kelurahan Kebonjati kecamatan Cikole Kota Sukabumi, tepatnya di Jl. Siliwangi No.54 Cikole Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113 Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian

3.2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang akan diteliti, adapun informasi yang di dapat adalah berupa data primer dan data sekunder.

3.2.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari unit pengamatan penelitian (observasi) dan wawancara. Adapun cara yang digunakan penulis yakni terjun langsung ke instansi terkait untuk melakukan analisis, melihat keadaan dari sistem yang berjalan dan memberikan evaluasi dari kinerja Sistem tersebut.

3.2.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah di olah terlebih dahulu oleh pihak pertama, yakni dokumen-dokumen yang ada. Studi dokumentasi yang digunakan adalah pencarian bahan-bahan atau buku-buku bacaan, karya ilmiah dan sumber-sumber bacaan lainya seperti dari internet

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengawasan Lurah terhadap Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kebonjati

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak negara yang dalam pengelolaannya perlu diadakan peningkatan dalam rangka penambahan kas penerimaan negara berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat serta melalui usaha-usaha kegiatan pengelolaan yang baik dan profesional berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Adapun Pengelolaan yang dilakukan yaitu melalui usaha-usaha perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kantor Kelurahan

Kebonjati sebagai organisasi yang melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah yang berkoordinasi dengan masing-masing kelurahan berusaha untuk memperoleh pemasukan pajak dengan mengupayakan semua potensi yang ada dan didasarkan pada wilayah kerja dari Kelurahan Kebonjati sehingga diperlukan kerja keras dari personilnya agar semua potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

1. Perencanaan

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang pertama oleh karena itu perencanaan menduduki tempat dan peranan yang penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, perencanaan sebagai salah satu fungsi administrasi dan manajemen yaitu keseluruhan proses menentukan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kebonjati.

Dalam hal ini kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah pendataan. Kegiatan pendataan ini dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif. Adapun kegiatan pendataan dengan Pembentukan basis data . Kegiatan pembentukan basis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kegiatan persiapan Kegiatan persiapan tersebut meliputi survei pendahuluan dan penyusunan rencana kerja, penyusunan konsep peta blok, dan penyusunan konsep Zona Nilai Tanah (ZNT).
- b. Kegiatan lapangan Kegiatan lapangan tersebut meliputi pengukuran identifikasi / verifikasi

objek pajak, penyebaran pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan perekaman SPOP, penggambaran bidang objek pajak dan pemberian Nomor Objek Pajak (NOP) serta penggambaran peta blok, peta kelurahan dan peta ZNT.

- c. Kegiatan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Kegiatan ini meliputi pengumpulan harga jual tanah atau transaksi, analisa Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dari harga jual atau transaksi, penentuan nilai jual setiap ZNT, penyusunan keputusan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak tentang NJOP beserta lampirannya, dan penyebaran pengisian surat pemberitahuan objek pajak.
2. Pemutakhiran data Kegiatan ini meliputi menatausahakan laporan mutasi atau perubahan data yang diterima serta melaksanakan verifikasi data objek pajak. Verifikasi data obyek pajak dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pencocokan data obyek dan subyek pajak dengan keadaan di lapangan
 - b. pencocokan klasifikasi obyek pajak dengan NJOP yang sebenarnya di lapangan.
 3. Pengumpulan data harga pasar obyek pajak Pengumpulan data harga pasar obyek pajak dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait secara koordinatif dan berpedoman pada pengumpulan harga jual tanah.

Hasil wawancara dengan Sekertaris Kelurahan Kebonjati mengatakan bahwa : “Perencanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi kegiatan pendataan dalam hal ini pengumpulan harga jual tanah, kegiatan tersebut dilaksanakan di masing-masing seksi yang menjadi ruang lingkup Kelurahan Kebonjati.

Tahapan-tahapan dalam pengumpulan harga jual tanah untuk tingkat kelurahan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data oleh Lurah dengan mengkoordinasikan penghimpunan data harga jual tanah sesuai dengan harga tanah yang berlaku diwilayahnya.
2. Evaluasi harga jual tanah, dengan cara :
 - a. Berdasarkan himpunan data harga jual tanah diwilayahnya, Lurah menyelenggarakan rapat evaluasi harga jual tanah dengan mengikutsertakan para perangkat kelurahan dan para kepala lingkungan.
 - b. Dalam rapat evaluasi harga jual tanah tersebut, dibahas hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan harga jual tanah seperti perbandingan/tingkat kenaikan harga tanah dari tahun sebelumnya dan penyebab adanya perubahan naik / turun harga jual tanah.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan mengatakan bahwa :

“Kami bekerja sama dengan masing-masing seksi untuk menyampaikan SPPT kepada masyarakat wajib pajak, SPPT tersebut diserahkan kepada kepala lingkungan yang kemudian disampaikan kepada warga wajib pajak.”

Kemudian hasil wawancara dengan salah satu wajib pajak di Kelurahan Kebonjati :

“SPPT saya terima dari kepala lingkungan, kemudian pembayarannya dilakukan di kantor kelurahan atau bisa juga di bank yang ditunjuk dalam SPPT tersebut.”

Hasil wawancara dengan Staf kolektor PBB Kelurahan mengatakan bahwa :

“Saya disini bertindak sebagai kolektor dalam pelaksanaan pemungutan

PBB di masing-masing kelurahan, kemudian hasilnya dilaporkan ke Kantor kecamatan, dan dalam beberapa tahun terakhir ini penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wanea melebihi target dalam realisasinya.”

Dari hasil wawancara dengan Lurah Kebonjati menyatakan bahwa:

“Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk dikembangkan yang dikenakan atas kepemilikan bumi dan bangunan. Yang dikenakan pajak disini adalah bumi dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak.”

Lebih lanjut Sekertaris Kelurahan Kebonjati mengatakan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Wanea setiap tahunnya memberikan hasil yang memuaskan dalam pencapaian Target dan realisasinya. Tentunya pengelolannya juga perlu ditingkatkan agar memberikan hasil yang lebih memuaskan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan target Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kebonjati senantiasa mengalami kenaikan begitupun realisasi penerimaannya pada setiap tahunnya.

Pengorganisasian merupakan suatu proses manajemen dengan mengelompokkan tugas, kegiatan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pengorganisasian adalah agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap anggota organisasi dapat meningkatkan keterampilannya secara khusus (spesialisasi) dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan. Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan

penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya.

Dari wawancara diatas Lurah kelurahan Kebonjati telah melakukan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya, menurut alur peraturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

4.2. Pencapaian Target Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tahun 2015 mencapai 103,6%, atau dari target sebesar Rp7,750 miliar, terealisasi mencapai Rp8,032 miliar lebih. Artinya, PBB-P2 melebihi target yang sudah ditentukan. Selain PBB-P2, pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) juga menunjukkan hal yang sama yakni sebesar 111,5%, atau dari target Rp7.250 miliar lebih, ternyata tercapai Rp8,081, miliar lebih.

"Alhamdulillah, target PBB dan BPHTB di tahun 2015 untuk kelurahan Kebonjati melebihi target yang sudah ditentukan," jelas Kepala UPT PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi Rakhman Gania Kusumah saat ditemui penulis,

Di tahun 2016, lanjut Rakhman,

Target pencapaian PBB dan BPHTB masing-masing dinaikan dari target sebelumnya. Untuk PBB semula Rp7.750.000.000 menjadi Rp8.000.000.000 dan BPHTB semula Rp7.250.000.000 ditahun 2016 menjadi Rp7.500.000.000."Kita optimis meskipun terget perolehan kedua pajak dinaikan akan tercapai, bahkan bisa melebihi target yang sudah ditentukan. Saat ini saja periode Januari sampai Februari 2016 PBB sudah mencapai Rp756.331 juta lebih, sedangkan BPHTB mencapai Rp1.174.526 miliar," ujar dia.

Makanya, kata Rakhman, pihaknya terus melakukan kegiatan verifikasi pendataan di beberapa kecamatan dan kelurahan , tujuannya, untuk memperoleh data objek pajak serta mendapatkan potensi - potensi pajak yang real."Tahun 2015 lalu kita lakukan di Kecamatan Cikole, dan di tahun 2016 kita

laksanakan di Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong," aku Rakhman.

Kelurahan Kebonjati tidak menampik bahwa dalam penarikan pajak masih ada kendala yang harus di lalui, diantaranya, masyarakat belum terbiasa bayar langsung ke Bank dan ke Kantor UPT Pajak langsung. Alasannya, mereka terbiasa dengan petugas pemungut pajak yang selalu mendatangi mereka. Untuk itu, kata Lurah, pihaknya selalu melakukan jemput bola ke masyarakat, selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga memberikan sosialisasi tentang pajak serta mengajak agar masyarakat membayar pajak melalui bank maupun outlet PBB yang telah disediakan.

"Kita sering lakukan itu sampai saat ini juga. bahkan seiring waktu berjalan kesadaran masyarakat akan membayar pajak kian meningkat," jelas Sekretaris Kelurahan.

Untuk memberi motivasi bahkan tambah Kepala UPT, pihaknya memberikan reward kepada kecamatan dan kelurahan yang rangkingnya bagus dalam pembayaran PBB. Untuk Tahun 2015, ada empat penerima reward, yakni satu kecamatan dan tiga kelurahan."Untuk tingkat kecamatan, kecamatan Warudoyong dengan nilai 90,55 persen, sedangkan kelurahan yaitu, juara pertam diraih oleh kelurahan Jayamekar dengan nilai 102,82 persen, kemudian disusul oleh kelurahan Dayeuhluhur dengan nilai 97,15 persen dan berikutnya kelurahan cipanengah dengan nilai 97,03 persen. Rewa ini biasa diberikan pada upacara peringatan HUT Kota Sukabumi .

V. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Lurah Kelurahan Kebonjati terhadap pegawainya dalam dinamika penarikan pajak kepada masyarakat, guna pencapaian target yang telah dibebankan oleh pimpinan diatasnya telah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian bahwa fungsi pengawasan dari pimpinan kepada bawahan dalam hal ini lurah kepada petugas pemungut pajak serta jajarannya yang terkait, memberi

dampak positif kepada pencapaian target. Demikian pula bahwa fungsi pengawasan yang terpadu di atas jabatan Lurah yaitu Camat dan Kepala UPT ditingkat Kota Sukabumi, telah dilakukan dengan baik pula.

2. Saran

Kendati pencapaian target telah dipenuhi bahkan terlampaui, penulis melihat bahwa masyarakat wajib pajak masih perlu penjelasan atau sosialisasi yang intensif, tentang tatacara pembayaran PBB dapat dilakukan sendiri melalui media elektronik, maupu perbankan tidak harus menunggu petugas pemungut pajak datang kerumah wajib pajak.

Kepada petugas pemungut pajak bumi dan bangunan, walau telah dibuka akses perbankan maupun media elektronik dalam pembayarannya, masih dirasakan tetap harus menjemput bola, minimal sekedar mengingatkan ataupun pun operasional pemungutan sebagaimana mestinya agar target pencapaian pembayaran PBB dapat dipertahankan pencapaiannya. karena hal ini berkaitan langsung dengan asset Anggaran Pemerintahan Daerah.

Rahayu, Kurnia.2006. Perpajakan (Konsep,Teori,dan Isu) Indonesia.Jakarta: Penerbit Kencana

Rochmat Soemitro, dan Zainal Muttaqin, 2001. Pajak Bumi dan Bangunan (edisi revisi).Bandung: PT Refika Aditama.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darwin, MBP. 2009. Pajak Bumi dan Bangunan dalam Tataran Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo.2003.Perpajakan.Yogyakarta:Andi
- Marsono.1986. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Djembatan
- Martani dan Lubis, 1987. Teori Organisasi. Bandung: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexi J., 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya